



Kinerja Sekretariat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

Imania Fathu Zahra¹, Evi Satispi²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email : imaniazahra02@gmail.com¹

Abstract

The faction secretariat plays a strategic role in supporting the effective implementation of legislative functions in the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI). This study aims to analyze the performance of the Secretariat of the National Mandate Party (PAN) Faction of the DPR RI as a legislative support organization that carries out administrative and technical functions for faction members. The study employed a qualitative approach with a descriptive design. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving leaders and staff of the faction secretariat who are directly engaged in daily work activities. Data analysis was conducted qualitatively through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the performance of the PAN Faction Secretariat of the DPR RI is generally satisfactory, although it faces a high workload and the dynamic nature of frequently changing faction agendas. Work quality, timeliness, initiative, competence, and communication are interrelated in supporting the effectiveness of secretariat operations. Initiative and internal communication are key factors in maintaining smooth administrative services amid limitations in human resources. This study emphasizes the importance of sustainable performance management of legislative support organizations to optimally support the implementation of legislative functions.

Keywords: *Organizational Performance, Faction Secretariat, DPR RI, Public Administration*

Abstrak

Sekretariat fraksi memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Sekretariat Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI sebagai organisasi pendukung legislatif yang menjalankan fungsi administratif dan teknis bagi anggota fraksi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pimpinan serta pegawai sekretariat fraksi yang terlibat langsung dalam aktivitas kerja sehari-hari. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat Fraksi PAN DPR RI secara umum berjalan cukup baik, meskipun dihadapkan pada beban kerja yang tinggi dan dinamika agenda fraksi yang berubah-ubah. Kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi saling berkaitan dalam mendukung efektivitas kerja sekretariat. Inisiatif dan komunikasi internal menjadi faktor penting yang membantu menjaga kelancaran pelayanan administratif di tengah keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengelolaan kinerja organisasi pendukung legislatif secara berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi secara optimal.

Kata kunci: *Kinerja Organisasi, Sekretariat Fraksi, DPR RI, Administrasi Publik*

PENDAHULUAN

Keberadaan sekretariat fraksi dalam struktur Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memegang peranan strategis yang sering kali luput dari perhatian publik. Di balik setiap proses legislasi, fungsi pengawasan, dan kegiatan representasi politik anggota dewan, terdapat kerja administratif yang dijalankan secara kontinu oleh sekretariat fraksi. Unit ini menjadi penghubung antara kebutuhan politis anggota fraksi dengan tata kelola kelembagaan DPR RI yang bersifat formal dan prosedural (Sumandiyar & Nur, 2023). Tanpa dukungan sekretariat fraksi yang bekerja secara efektif, aktivitas legislasi berpotensi mengalami hambatan administratif yang berdampak langsung pada kualitas kinerja lembaga perwakilan rakyat (Adventy et al., 2024).

Sekretariat Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menjalankan fungsi pelayanan administratif dan teknis yang meliputi pengelolaan keuangan fraksi, penyelenggaraan rapat, pendokumentasian kegiatan, hingga penyediaan dukungan operasional bagi anggota fraksi (Tampubolon, 2024). Kompleksitas tugas tersebut menuntut kinerja yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga pada ketepatan waktu, ketelitian, kemampuan beradaptasi, serta komunikasi internal yang efektif. Dalam praktiknya, sekretariat fraksi dihadapkan pada dinamika politik yang fluktuatif, agenda kerja anggota dewan yang padat, serta keterbatasan sumber daya manusia yang harus dikelola secara efisien (Nahas & Hustinawati, 2023a).

Fenomena yang muncul di lingkungan Sekretariat Fraksi PAN DPR RI menunjukkan adanya tuntutan kerja yang tinggi seiring dengan intensitas aktivitas fraksi di parlemen (Srifridayanti et al., 2023). Setiap periode sidang, sekretariat harus memastikan kelancaran administrasi rapat paripurna, rapat komisi, rapat fraksi, serta kegiatan kunjungan kerja dan penerimaan aspirasi masyarakat. Dalam satu bulan masa sidang, agenda rapat dan kegiatan pendukung dapat berlangsung hampir setiap hari kerja, sehingga menempatkan sekretariat fraksi pada posisi strategis sekaligus rentan terhadap tekanan beban kerja. Kondisi ini menuntut kinerja yang konsisten dan terukur, bukan hanya berdasarkan persepsi subjektif, tetapi melalui indikator kinerja yang jelas (Dani et al., 2025).

Di sisi lain, tuntutan profesionalisme aparatur pendukung legislatif semakin menguat seiring dengan meningkatnya ekspektasi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga negara (Anggraini et al., 2025). Masyarakat tidak hanya menilai kinerja DPR RI dari hasil legislasi yang dihasilkan, tetapi juga dari bagaimana proses internal lembaga tersebut dikelola secara tertib, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Sekretariat fraksi, meskipun

berada di balik layar, memiliki kontribusi langsung terhadap citra kelembagaan DPR RI. Ketidaktepatan administrasi, keterlambatan pelayanan, atau lemahnya koordinasi internal berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap efektivitas kerja anggota fraksi (Yulianita et al., 2024).

Permasalahan kinerja sekretariat fraksi tidak selalu muncul dalam bentuk kegagalan besar, melainkan sering kali hadir dalam persoalan-persoalan administratif yang berulang. Keterbatasan jumlah pegawai dibandingkan dengan volume pekerjaan, distribusi tugas yang belum sepenuhnya proporsional, serta kebutuhan koordinasi lintas unit yang intensif menjadi tantangan yang terus dihadapi (Putri & Handayani, 2024). Dalam situasi tertentu, pegawai sekretariat harus menjalankan lebih dari satu fungsi kerja secara bersamaan, terutama pada masa-masa padat agenda politik. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas kerja, ketepatan penyelesaian tugas, dan inisiatif pegawai dalam merespons kebutuhan fraksi.

Data internal menunjukkan bahwa jumlah pegawai sekretariat fraksi relatif terbatas dibandingkan dengan cakupan tugas yang harus dilaksanakan (Pebriansyah et al., 2025). Dalam struktur Sekretariat Fraksi PAN DPR RI, jumlah pegawai inti yang menangani administrasi keuangan, persidangan, dan dukungan operasional berada pada kisaran belasan orang, sementara agenda kegiatan fraksi dapat melibatkan puluhan hingga ratusan aktivitas dalam satu tahun masa kerja (Sujana, 2024). Rasio antara beban kerja dan ketersediaan sumber daya manusia ini menempatkan sekretariat pada kondisi kerja yang menuntut efisiensi tinggi dan kemampuan manajerial yang baik di tingkat operasional.

Selain kuantitas sumber daya manusia, kualitas kerja juga menjadi perhatian penting. Ketelitian dalam pengelolaan keuangan, akurasi dalam penyusunan laporan, serta ketepatan dalam menyiapkan kebutuhan rapat merupakan aspek yang tidak dapat ditawar (SUPRYADI, 2024). Kesalahan administratif, sekecil apa pun, berpotensi menimbulkan implikasi kelembagaan yang serius, terutama dalam aspek pertanggungjawaban anggaran dan kredibilitas fraksi. Oleh karena itu, kinerja sekretariat fraksi tidak hanya dinilai dari output pekerjaan yang terlihat, tetapi juga dari proses kerja yang dijalankan sesuai standar profesional.

Masalah lain yang mengemuka adalah bagaimana inisiatif dan komunikasi internal berkembang di lingkungan sekretariat fraksi. Dalam organisasi pendukung legislatif yang bersifat hierarkis, ruang untuk berinisiatif sering kali dihadapkan pada batasan prosedural. Namun, tuntutan kerja yang dinamis justru memerlukan kemampuan pegawai untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam menyelesaikan tugas, mengantisipasi kebutuhan

fraksi, serta membantu rekan kerja ketika terjadi lonjakan beban kerja. Komunikasi yang efektif antara pimpinan sekretariat, staf, dan anggota fraksi menjadi faktor penentu kelancaran kerja administratif sehari-hari (Firmansyah & Hidayat, 2023).

Berangkat dari kondisi tersebut, evaluasi kinerja Sekretariat Fraksi PAN DPR RI menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan individu, melainkan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai bagaimana kinerja sekretariat dijalankan, faktor-faktor apa yang memengaruhinya, serta aspek mana yang memerlukan penguatan. Penilaian kinerja yang sistematis memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi kelebihan yang telah berjalan baik sekaligus mengenali area kerja yang masih membutuhkan perbaikan.

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada kinerja Sekretariat Fraksi PAN DPR RI dengan menggunakan indikator kinerja yang mencakup kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi. Kelima indikator tersebut dipandang relevan untuk menggambarkan kinerja organisasi pendukung legislatif yang bekerja dalam lingkungan birokrasi politik. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya menangkap realitas kerja sekretariat fraksi sebagaimana dialami oleh para pelaku di dalamnya, bukan sekadar berdasarkan penilaian administratif formal.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi kinerja Sekretariat Fraksi PAN DPR RI dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi. Temuan empiris dari penelitian ini juga diharapkan mampu menjelaskan hubungan antara beban kerja, kapasitas sumber daya manusia, dan efektivitas pelayanan administratif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengayaan kajian administrasi publik di ranah legislatif, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi pengelolaan sekretariat fraksi agar mampu bekerja secara lebih optimal.

Solusi yang ditawarkan melalui penelitian ini tidak bersifat normatif semata, melainkan bertumpu pada realitas kerja yang dihadapi sekretariat fraksi. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan pola koordinasi internal, serta penataan distribusi tugas menjadi isu-isu yang muncul dari analisis kinerja. Dengan memahami kinerja sekretariat fraksi secara komprehensif, diharapkan lembaga pendukung legislatif dapat terus beradaptasi dengan tuntutan kerja parlemen yang semakin kompleks, sekaligus menjaga profesionalisme dan akuntabilitas dalam setiap proses administrasi yang dijalankan.

KAJIAN TEORI

Kajian mengenai kinerja organisasi dalam sektor publik menempatkan manusia dan proses kerja sebagai elemen utama dalam pencapaian tujuan organisasi. Kinerja tidak semata-mata dipahami sebagai hasil akhir dari suatu pekerjaan, melainkan sebagai rangkaian aktivitas yang mencerminkan bagaimana tugas dilaksanakan, bagaimana sumber daya dimanfaatkan, serta bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dalam struktur organisasi. Dalam organisasi pemerintahan dan lembaga negara, kinerja memiliki dimensi yang lebih kompleks karena berkaitan langsung dengan kepentingan publik, akuntabilitas kelembagaan, serta tuntutan profesionalisme aparatur (Nahas & Hustinawati, 2023b).

Organisasi pendukung legislatif, termasuk sekretariat fraksi di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, merupakan bagian dari birokrasi publik yang memiliki karakteristik khusus. Organisasi ini bekerja dalam lingkungan politik yang dinamis, namun tetap terikat pada aturan administratif dan prosedural yang ketat. Peran sekretariat fraksi tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, tetapi juga mencakup dukungan teknis yang memungkinkan anggota fraksi menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi secara efektif (Muklis & Ahda, 2023). Oleh karena itu, kinerja sekretariat fraksi menjadi faktor penting dalam menopang kinerja kelembagaan DPR RI secara keseluruhan. Dalam perspektif administrasi publik, kinerja organisasi dipengaruhi oleh kesesuaian antara tuntutan pekerjaan dengan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia. Pegawai dituntut untuk memiliki kemampuan teknis, sikap profesional, serta pemahaman terhadap tujuan organisasi. Pada saat yang sama, organisasi dituntut untuk menyediakan sistem kerja, pembagian tugas, dan mekanisme komunikasi yang mendukung efektivitas kerja. Ketidakseimbangan antara beban kerja dan kapasitas pegawai berpotensi menurunkan kualitas kinerja, meskipun secara formal prosedur kerja telah dijalankan (Ashari & Amalia, 2023).

Konsep kinerja yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pandangan yang menempatkan kinerja sebagai perilaku kerja yang dapat diamati dan diukur melalui indikator tertentu. Kinerja dipahami sebagai hasil interaksi antara kemampuan individu, motivasi kerja, serta lingkungan organisasi. Dalam konteks organisasi pendukung legislatif, kinerja tidak selalu dapat diukur melalui indikator kuantitatif semata, melainkan membutuhkan pendekatan kualitatif yang mampu menangkap dinamika kerja sehari-hari, pola komunikasi internal, dan

kemampuan pegawai dalam merespons tuntutan kerja yang berubah-ubah (Saputra & Nugroho, 2025). Salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk menganalisis kinerja individu dan organisasi adalah model kinerja yang dikemukakan oleh T.R. Mitchell. Model ini menekankan bahwa kinerja dapat dilihat melalui sejumlah indikator yang mencerminkan perilaku kerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Indikator-indikator tersebut meliputi kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi. Kelima indikator ini dipandang relevan untuk mengukur kinerja dalam organisasi yang menuntut ketelitian administratif, koordinasi intensif, serta kemampuan adaptasi terhadap situasi kerja yang dinamis (Demmanggasa, 2023).

Kualitas kerja mencerminkan tingkat ketelitian, akurasi, dan kesesuaian hasil kerja dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam organisasi pendukung legislatif, kualitas kerja berkaitan erat dengan kemampuan pegawai dalam mengelola dokumen, menyusun laporan, menyiapkan kebutuhan rapat, serta mengelola administrasi keuangan fraksi (Brori et al., 2024). Kualitas kerja yang baik ditunjukkan melalui minimnya kesalahan administratif, kerapihan dokumen, serta kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Sebaliknya, kualitas kerja yang rendah berpotensi menimbulkan hambatan dalam proses legislasi dan menurunkan kepercayaan internal terhadap kinerja sekretariat. Ketepatan waktu menjadi indikator penting dalam menilai kinerja sekretariat fraksi karena sebagian besar tugas bersifat terikat jadwal dan agenda kelembagaan. Persiapan rapat, penyampaian dokumen, dan penyelesaian administrasi harus dilakukan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Ketidaktepatan waktu tidak hanya berdampak pada tertundanya kegiatan fraksi, tetapi juga dapat memengaruhi efektivitas kerja anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasi (Mochammad et al., 2023). Oleh karena itu, ketepatan waktu mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengelola waktu dan sumber daya secara efisien.

Inisiatif tercermin dari kesediaan pegawai untuk mengambil langkah-langkah awal dalam menyelesaikan pekerjaan, mengoordinasikan tugas dengan rekan kerja, serta menawarkan alternatif solusi ketika menghadapi kendala administratif. Dalam praktik kerja sekretariat fraksi, inisiatif sering kali muncul ketika terjadi lonjakan beban kerja, misalnya pada masa sidang atau saat pelaksanaan kegiatan politik yang intensif. Pegawai yang memiliki inisiatif tinggi cenderung bersedia membantu rekan kerja di luar pembagian tugas formal, menjaga keberlangsungan alur kerja, dan memastikan bahwa kebutuhan fraksi tetap terpenuhi. Sikap ini menunjukkan adanya kepedulian terhadap tujuan organisasi serta kesadaran bahwa keberhasilan kerja tidak hanya ditentukan oleh penyelesaian tugas individu,

tetapi juga oleh kinerja kolektif (Hermawan & Indrawan, 2025). Kemampuan pegawai berkaitan erat dengan kompetensi yang dimiliki dalam melaksanakan tugas-tugas sekretariat fraksi. Kompetensi tersebut mencakup pengetahuan mengenai prosedur kelembagaan, keterampilan teknis administrasi, serta pengalaman kerja yang relevan dengan bidang tugas yang diemban. Dalam organisasi pendukung legislatif, kemampuan pegawai menjadi faktor penentu kualitas pelayanan administratif yang diberikan kepada anggota fraksi (Minarti, 2024). Tugas-tugas seperti pengelolaan dokumen, penyusunan laporan, pengaturan agenda rapat, dan administrasi keuangan membutuhkan tingkat ketelitian dan pemahaman prosedural yang tinggi. Pegawai yang memiliki kemampuan memadai akan lebih mudah menjalankan tugas secara mandiri, meminimalkan kesalahan administratif, serta menyesuaikan diri dengan kompleksitas pekerjaan yang terus berkembang (Muttaqin & Apriadi, 2025).

Kemampuan juga berperan dalam mendukung fleksibilitas kerja pegawai. Dalam situasi tertentu, sekretariat fraksi menuntut pegawai untuk menangani lebih dari satu jenis tugas secara bersamaan. Pegawai yang memiliki kemampuan teknis dan pemahaman kerja yang baik akan lebih siap menghadapi kondisi tersebut tanpa mengorbankan kualitas hasil kerja (Santoso & Mariana, 2024). Sebaliknya, keterbatasan kemampuan berpotensi menimbulkan ketergantungan berlebihan pada arahan atasan, memperlambat proses kerja, dan meningkatkan risiko kesalahan. Oleh karena itu, kemampuan tidak hanya dipandang sebagai modal individu, tetapi juga sebagai aset organisasi yang menentukan keberlangsungan kinerja sekretariat fraksi (Wulandami et al., 2023). Komunikasi merupakan indikator kinerja yang memiliki peran sentral dalam mendukung inisiatif dan kemampuan pegawai. Komunikasi yang efektif memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang jelas, tepat, dan akurat antara pegawai, pimpinan sekretariat, dan anggota fraksi (Syahidah, 2024). Dalam lingkungan kerja sekretariat fraksi, komunikasi menjadi sarana utama untuk menyampaikan instruksi, mengoordinasikan tugas, serta menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kerja. Komunikasi yang berjalan dengan baik akan memperkuat koordinasi internal, memperjelas pembagian tugas, dan mencegah terjadinya kesalahpahaman (Ruhimat, 2025).

Dengan menggunakan kerangka kinerja yang mencakup kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi, penelitian ini menempatkan kinerja Sekretariat Fraksi PAN DPR RI sebagai objek kajian yang dapat dianalisis secara sistematis. Kerangka ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan kondisi kinerja sekretariat fraksi secara lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi hasil kerja, tetapi juga dari proses dan perilaku kerja

yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini dipandang relevan untuk memahami peran strategis sekretariat fraksi dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi di DPR RI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam kinerja Sekretariat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana berlangsung dalam praktik kerja sehari-hari. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap realitas sosial, dinamika kerja, serta pandangan subjek penelitian secara utuh, khususnya dalam menilai aspek-aspek kinerja yang tidak selalu dapat diukur secara kuantitatif (Ardiansyah et al., 2024).

Lokasi penelitian ditetapkan di Sekretariat Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sekretariat fraksi merupakan unit kerja yang secara langsung memberikan dukungan administratif dan teknis kepada anggota fraksi dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Dengan menempatkan sekretariat fraksi sebagai locus penelitian, peneliti dapat mengamati secara langsung proses kerja, pola koordinasi, serta mekanisme pelayanan administratif yang dijalankan dalam mendukung aktivitas fraksi di parlemen.

Subjek penelitian ditentukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung informan dalam aktivitas sekretariat fraksi. Informan penelitian terdiri atas pimpinan sekretariat dan pegawai sekretariat fraksi yang memiliki pengalaman kerja serta pemahaman memadai mengenai pelaksanaan tugas administratif dan teknis fraksi (Romadhon & Mustofa, 2024). Pemilihan informan dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan, mendalam, dan sesuai dengan fokus penelitian mengenai kinerja sekretariat fraksi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta penilaian informan mengenai pelaksanaan tugas dan kinerja sekretariat fraksi (Budiharjo et al., 2023). Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas kerja, interaksi antarpegawai, serta dinamika kerja di lingkungan sekretariat fraksi. Dokumentasi digunakan sebagai sumber data pendukung yang mencakup dokumen administratif, arsip kegiatan, dan catatan kerja yang relevan dengan fokus penelitian. Penggunaan ketiga teknik tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang saling melengkapi dan memperkuat temuan penelitian (Melinda et al., 2023).

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu diseleksi dan dipilah sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan, dan makna yang muncul dari data (Saputra & Nugroho, 2025). Tahap akhir analisis dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan temuan empiris yang telah dianalisis secara sistematis.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat kepercayaan yang memadai dan mencerminkan kondisi empiris yang sebenarnya (Tresia et al., 2024).

Melalui metode penelitian ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang akurat dan mendalam mengenai kinerja Sekretariat Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, sekaligus mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kerja organisasi pendukung legislatif tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI dapat dipahami sebagai rangkaian aktivitas administratif dan teknis yang berjalan dalam situasi kerja yang dinamis dan menuntut tingkat koordinasi tinggi. Berdasarkan temuan lapangan, sekretariat fraksi menjalankan perannya sebagai unit pendukung utama bagi anggota fraksi dalam melaksanakan fungsi legislasi. Peran tersebut tidak hanya tercermin dalam penyediaan layanan administratif, tetapi juga dalam kemampuan sekretariat untuk menyesuaikan diri dengan ritme kerja parlemen yang padat dan sering mengalami perubahan agenda secara mendadak. Dari aspek kualitas kerja, hasil penelitian memperlihatkan bahwa sekretariat fraksi berupaya menjaga ketelitian dan kerapihan dalam setiap proses administrasi yang dijalankan. Pengelolaan dokumen rapat, penyusunan laporan kegiatan, serta administrasi keuangan fraksi dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pegawai menunjukkan pemahaman yang cukup baik terhadap standar kerja yang harus dipenuhi, terutama dalam hal keakuratan dokumen dan kepatuhan terhadap mekanisme kelembagaan DPR RI. Namun demikian, kualitas kerja tersebut sangat dipengaruhi oleh

kondisi beban kerja yang dihadapi. Pada periode tertentu, terutama saat agenda fraksi meningkat, kualitas kerja berpotensi tertekan oleh keterbatasan waktu dan jumlah pegawai yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas kerja tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh dukungan sistem kerja dan pembagian tugas yang proporsional.

Ketepatan waktu menjadi indikator kinerja yang memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas sekretariat fraksi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pegawai sekretariat berupaya memenuhi tenggat waktu penyelesaian tugas, terutama yang berkaitan dengan persiapan rapat dan penyampaian dokumen kepada anggota fraksi. Dalam banyak kasus, tugas dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan. Namun, perubahan agenda fraksi yang sering terjadi secara mendadak menuntut penyesuaian kerja dalam waktu singkat. Situasi ini mengharuskan pegawai untuk bekerja secara fleksibel, bahkan di luar jam kerja formal, guna memastikan kelancaran kegiatan fraksi. Ketepatan waktu dalam kondisi tersebut menjadi cerminan kemampuan sekretariat dalam mengelola tekanan kerja, meskipun pada saat yang sama memperlihatkan adanya risiko kelelahan kerja apabila kondisi tersebut berlangsung secara terus-menerus.

Inisiatif pegawai muncul sebagai salah satu kekuatan utama dalam mendukung kinerja sekretariat fraksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai tidak sepenuhnya bergantung pada instruksi formal dalam menjalankan tugas, melainkan mampu mengambil langkah proaktif ketika menghadapi kebutuhan kerja yang mendesak. Inisiatif ini tampak dalam kesediaan pegawai untuk membantu rekan kerja, mengantisipasi kebutuhan administratif fraksi, serta mencari solusi atas kendala yang muncul dalam proses kerja. Dalam situasi lonjakan beban kerja, inisiatif pegawai menjadi faktor penting yang menjaga keberlangsungan pelayanan administratif. Sikap proaktif tersebut mencerminkan adanya kesadaran kolektif bahwa keberhasilan kerja sekretariat fraksi bergantung pada kerja sama dan kepedulian terhadap tujuan organisasi, bukan semata-mata pada pembagian tugas formal. Kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas sekretariat fraksi berkaitan erat dengan pengalaman kerja dan penguasaan prosedur kelembagaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki pemahaman yang memadai mengenai tugas dan tanggung jawab yang diemban. Pengalaman kerja yang dimiliki membantu pegawai dalam menyesuaikan diri dengan kompleksitas tugas administratif yang harus dijalankan. Kemampuan teknis tersebut memungkinkan pegawai untuk bekerja secara mandiri, meminimalkan kesalahan, serta merespons kebutuhan fraksi dengan relatif cepat. Namun

demikian, kemampuan pegawai juga diuji oleh tuntutan kerja yang semakin beragam. Dalam beberapa kondisi, pegawai harus menangani lebih dari satu jenis tugas secara bersamaan, sehingga membutuhkan kemampuan adaptasi yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pegawai menjadi aspek penting dalam menjaga kinerja sekretariat fraksi agar tetap optimal. Komunikasi internal memainkan peran sentral dalam mendukung kinerja sekretariat fraksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara pimpinan sekretariat dan pegawai umumnya berjalan secara langsung dan bersifat koordinatif. Informasi mengenai agenda kerja, pembagian tugas, dan perubahan rencana kegiatan disampaikan melalui jalur komunikasi internal yang telah terbentuk. Komunikasi yang efektif memungkinkan pegawai untuk memahami tugas yang harus dikerjakan serta menyesuaikan prioritas kerja sesuai kebutuhan fraksi. Dalam praktiknya, komunikasi juga menjadi sarana untuk menyelesaikan permasalahan kerja secara cepat, terutama ketika terjadi perubahan agenda yang mendadak.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa intensitas komunikasi yang tinggi dapat menjadi tantangan tersendiri. Dalam situasi kerja yang padat, arus informasi yang cepat berpotensi menimbulkan kebingungan apabila tidak diimbangi dengan kejelasan pesan. Oleh karena itu, kualitas komunikasi menjadi sama pentingnya dengan frekuensi komunikasi itu sendiri. Komunikasi yang jelas dan terstruktur membantu mencegah tumpang tindih pekerjaan serta mengurangi risiko kesalahan dalam pelaksanaan tugas administratif.

Pembahasan terhadap kelima indikator kinerja tersebut menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat Fraksi PAN DPR RI tidak dapat dipahami secara terpisah-pisah. Kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi. Kinerja sekretariat fraksi tercipta melalui interaksi antara kapasitas individu pegawai dan sistem kerja organisasi yang menaunginya. Dalam kondisi beban kerja yang tinggi, inisiatif dan komunikasi menjadi faktor penyeimbang yang menjaga kualitas dan ketepatan penyelesaian tugas.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa sekretariat fraksi mampu menjalankan perannya sebagai organisasi pendukung legislatif dengan cukup efektif, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah keterbatasan struktural. Keterbatasan jumlah pegawai dibandingkan dengan volume pekerjaan menjadi tantangan yang terus muncul dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Namun, melalui inisiatif, kemampuan adaptasi, dan komunikasi internal yang relatif baik, sekretariat fraksi dapat menjaga kelancaran pelayanan administratif kepada anggota fraksi.

Hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa peningkatan kinerja sekretariat fraksi tidak hanya bergantung pada individu pegawai, tetapi juga memerlukan perhatian terhadap pengelolaan organisasi secara menyeluruh. Penataan beban kerja, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengelolaan komunikasi internal menjadi aspek penting yang dapat mendukung peningkatan kinerja ke depan.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai kinerja Sekretariat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai organisasi pendukung legislatif yang berperan penting dalam menunjang pelaksanaan fungsi fraksi di parlemen. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja sekretariat fraksi secara umum berjalan dengan cukup baik, meskipun dihadapkan pada dinamika kerja yang tinggi dan tuntutan administratif yang kompleks. Sekretariat fraksi tidak hanya menjalankan fungsi administratif secara rutin, tetapi juga berperan sebagai penopang utama kelancaran aktivitas legislasi anggota fraksi.

Dari aspek kualitas kerja, sekretariat fraksi menunjukkan upaya yang konsisten dalam menjaga ketelitian dan kepatuhan terhadap prosedur kelembagaan. Pengelolaan dokumen, penyusunan laporan, serta administrasi keuangan dilaksanakan sesuai dengan standar kerja yang berlaku. Namun, kualitas kerja tersebut sangat dipengaruhi oleh beban kerja yang meningkat pada periode tertentu, terutama ketika agenda fraksi berlangsung padat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas kerja tidak semata-mata ditentukan oleh kompetensi individu, tetapi juga oleh pengaturan sistem kerja dan distribusi tugas yang proporsional.

Ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas menjadi tantangan yang terus dihadapi oleh sekretariat fraksi. Perubahan agenda yang kerap terjadi secara mendadak menuntut kemampuan adaptasi dan fleksibilitas kerja yang tinggi. Pegawai sekretariat berupaya memenuhi tenggat waktu dengan menyesuaikan pola kerja dan, dalam beberapa kondisi, bekerja di luar jam kerja formal. Situasi ini mencerminkan komitmen pegawai terhadap tanggung jawab kerja, sekaligus mengindikasikan adanya potensi tekanan kerja yang perlu dikelola secara lebih sistematis agar tidak berdampak pada keberlanjutan kinerja.

Inisiatif pegawai menjadi salah satu faktor penting yang mendukung efektivitas kinerja sekretariat fraksi. Pegawai tidak hanya menunggu instruksi formal, tetapi mampu bertindak proaktif dalam mengantisipasi kebutuhan fraksi dan menyelesaikan permasalahan administratif yang muncul. Inisiatif ini terlihat dalam kerja sama antarpegawai, kesediaan

membantu rekan kerja, serta kemampuan mencari solusi dalam situasi kerja yang mendesak. Sikap proaktif tersebut menunjukkan adanya kepedulian terhadap tujuan organisasi dan kesadaran bahwa keberhasilan kerja sekretariat fraksi merupakan hasil kerja kolektif.

Kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas administratif dan teknis juga berperan penting dalam menjaga kinerja sekretariat fraksi. Pengalaman kerja dan pemahaman terhadap prosedur kelembagaan membantu pegawai dalam menghadapi kompleksitas tugas yang ada. Kemampuan tersebut memungkinkan pegawai untuk bekerja secara mandiri, mengurangi kesalahan administratif, serta menyesuaikan diri dengan tuntutan kerja yang beragam. Namun demikian, peningkatan kompleksitas tugas menuntut penguatan kapasitas pegawai secara berkelanjutan agar kinerja tetap terjaga.

Komunikasi internal menjadi pengikat utama yang menyatukan kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, dan kemampuan pegawai. Komunikasi yang berjalan secara langsung dan koordinatif mendukung kelancaran pembagian tugas serta penyampaian informasi terkait agenda fraksi. Meskipun demikian, arus informasi yang cepat dalam situasi kerja yang padat memerlukan kejelasan dan ketepatan penyampaian pesan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dengan demikian, komunikasi yang efektif tidak hanya bergantung pada intensitas, tetapi juga pada kualitas penyampaian informasi.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang diarahkan pada penguatan kinerja Sekretariat Fraksi PAN DPR RI secara berkelanjutan. Pengelolaan beban kerja menjadi aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius. Penyesuaian distribusi tugas yang lebih proporsional dapat membantu menjaga kualitas kerja dan ketepatan waktu penyelesaian tugas, terutama pada periode dengan intensitas agenda fraksi yang tinggi. Pengaturan kerja yang lebih terencana juga dapat mengurangi tekanan kerja yang berpotensi memengaruhi kinerja pegawai.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi rekomendasi penting untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam menghadapi kompleksitas tugas administratif dan teknis. Peningkatan kompetensi melalui pengembangan kemampuan teknis, pemahaman prosedur kelembagaan, serta pengayaan pengalaman kerja diharapkan dapat mendukung kemandirian pegawai dalam menjalankan tugas. Penguatan kapasitas ini juga dapat membantu sekretariat fraksi dalam beradaptasi dengan tuntutan kerja yang terus berkembang.

Pengelolaan komunikasi internal perlu terus diperkuat agar alur informasi berjalan secara jelas dan terstruktur. Kejelasan penyampaian informasi terkait agenda kerja dan

pembagian tugas dapat mencegah terjadinya tumpang tindih pekerjaan serta meningkatkan koordinasi antarpegawai. Komunikasi yang efektif juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat kerja sama tim dan menjaga suasana kerja yang kondusif di lingkungan sekretariat fraksi.

Selain itu, pengakuan terhadap inisiatif dan kontribusi pegawai perlu diperhatikan sebagai bagian dari upaya menjaga motivasi kerja. Apresiasi terhadap sikap proaktif dan kerja sama tim dapat mendorong pegawai untuk terus berkontribusi secara optimal dalam mendukung tujuan organisasi. Dengan mengelola kinerja sekretariat fraksi secara terencana dan berkelanjutan, diharapkan organisasi pendukung legislatif ini mampu terus meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas dalam menjalankan perannya di lingkungan DPR RI.

DAFTAR PUSTAKA

- Adventy, M. I. Y., Azhar, A., Putra, R., & Putri, C. A. (2024). Analisis Proses Administrasi Perjalanan Dinas Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. In *PERSPEKTIF* (Vol. 13, Issue 2, Pp. 392–400). Universitas Medan Area. <https://doi.org/10.31289/Perspektif.V13i2.10941>
- Angraini, E. S., Fitra, R., & Jarlis, R. (2025). Pengaruh Motivasi Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Mesin Isuzu Indonesia. In *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* (Vol. 4, Issue 4, Pp. 201–209). Universitas 45 Surabaya. <https://doi.org/10.30640/Inisiatif.V4i4.5236>
- Ardiansyah, M. M., Chilmy, K., & Wildan, M. A. (2024). Studi Kualitatif: Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia Terhadap Inovasi Di Sektor Publik Kabupaten Gresik. In *Journal Of Management And Creative Business* (Vol. 3, Issue 1, Pp. 171–189). Universitas 45 Surabaya. <https://doi.org/10.30640/Jmcbus.V3i1.3559>
- Ashari, A., & Amalia, R. A. (2023). Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat. In *Jurnal Ilmiah Global Education* (Vol. 4, Issue 1, Pp. 50–56). Lppm Institut Pendidikan Nusantara Global. <https://doi.org/10.55681/Jige.V4i1.539>
- Brori, D., Hendrasmo, I., & Nugraha, M. (2024). Evaluasi Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih. In *Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* (Vol. 1, Issue 3, Pp. 131–142). Asosiasi Seni Desain Dan Komunikasi Visual Indonesia. <https://doi.org/10.62383/Parlementer.V1i3.112>

- Budiharjo, A., Nur, L. Z., & Su'daa, S. N. (2023). Penguatan Aspek Sumber Daya Manusia Dan Organisasi Dalam Kebangkitan Bisnis Pasca Pandemi Melalui Fungsi Kepemimpinan (Studi Kasus Penelitian Kualitatif Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Pekalongan). In *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan* (Vol. 4, Issue 2, Pp. 165–174). Universitas Majalengka. <https://doi.org/10.31949/Entrepreneur.V4i2.4741>
- Dani, R., Apriansyah, N., Aprianty, H., & Aziz, S. (2025). Peran Sekretariat Dewan Dalam Membantu Pelaksanaan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. In *Jurnal Publisitas* (Vol. 12, Issue 1, Pp. 78–91). Lembaga Penelitian And Pengabdian Masyarakat (Lppm) Stisipol Candradimuka Palembang. <https://doi.org/10.37858/Publisitas.V12i1.574>
- Demmanggasa, Y. (2023). Studi Pengukuran Waktu Kerja Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan. In *Insta Advertisi Journal* (Vol. 3, Issue 2, Pp. 21–28). Aliansi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Advertisi). <https://doi.org/10.62728/Insta.V3i2.459>
- Firmansyah, F., & Hidayat, T. (2023). Pengaruh Pelatihan, Kompensasi Dan Ketepatan Waktu Terhadap Kinerja Driver Go-Jek Medan Polonia. In *Expensive: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* (Vol. 1, Issue 3, Pp. 348–358). Muhammadiyah Metro University. <https://doi.org/10.24127/Exclusive.V1i3.3963>
- Hermawan, A., & Indrawan, H. (2025). Kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru. In *Administraus* (Vol. 9, Issue 1, Pp. 146–154). Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Banua Banjarmasin. <https://doi.org/10.56662/Administraus.V9i1.302>
- Melinda, L. D., Harto, B., Sulistianingsih, Homan, H. S., & Puryati, D. (2023). Integrasi Teknologi Informasi Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia: Sebuah Studi Kualitatif Tentang Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Perusahaan. In *ATRABIS Jurnal Administrasi Bisnis (E-Journal)* (Vol. 9, Issue 2, Pp. 321–335). Politeknik LP3I. <https://doi.org/10.38204/Atrabis.V9i2.1820>
- Minarti, E. (2024). Perancangan Sistem Informasi Efisiensi Kinerja Pegawai Dengan Metode Data Envelopment Analysis. In *Jurnal Ilmu Komputer, Teknologi Dan Informasi* (Vol. 2, Issue 1, Pp. 22–31). CV. Graha Mitra Edukasi. <https://doi.org/10.62866/Jurikti.V2i1.122>

- Mochammad, M., Kurniawan, B. I., Ridzki, I., & Sutjipto, R. (2023). Analisis Kinerja Sistem Proteksi Berdasarkan Peramalan Beban Pada Penyulang Galunggung. In *Elposys: Jurnal Sistem Kelistrikan* (Vol. 10, Issue 3, Pp. 160–166). Politeknik Negeri Malang. <https://doi.org/10.33795/Elposys.V10i3.4582>
- Muklis, M., & Ahda, M. K. M. (2023). Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia. In *Legalitas: Jurnal Hukum* (Vol. 14, Issue 2, P. 265). Universitas Batanghari Jambi. <https://doi.org/10.33087/Legalitas.V14i2.348>
- Muttaqin, A. A. J., & Apriadi, D. (2025). Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Inovasi Produk Terhadap Kinerja Kewirausahaan. In *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan* (Vol. 3, Issue 3, Pp. 52–67). Universitas Maritim AMNI Semarang. <https://doi.org/10.58192/Wawasan.V3i3.3794>
- Nahas, A., & Hustinawati. (2023a). Analisis Kinerja Sistem Informasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Persepsi Masyarakat Menggunakan Metode Heuristics Evaluation. In *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer* (Vol. 10, Issue 5, Pp. 927–934). Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. <https://doi.org/10.25126/Jtiik.2023105716>
- Nahas, A., & Hustinawati. (2023b). Analisis Kinerja Sistem Informasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Persepsi Masyarakat Menggunakan Metode Heuristics Evaluation. In *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer* (Vol. 10, Issue 5, Pp. 927–934). Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. <https://doi.org/10.25126/Jtiik.20231055716>
- Pebriansyah, P., Sardiyo, S., & Susanto, Y. (2025). Analisis Kualitas Layanan Sekretariat Dprd Dalam Pelaksanaan Administrasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun. In *Jurnal Media Ekonomi (Jurmek)* (Vol. 29, Issue 3). Universitas Bina Insan. <https://doi.org/10.32767/Jurmek.V29i3.2558>
- Putri, F. A., & Handayani, N. (2024). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Formulasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. In *Jimu: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* (Vol. 3, Issue 1, Pp. 1–10). Pt Ruang Publikasi. <https://doi.org/10.70294/Jimu.V3i01.483>
- Romadhon, S., & Mustofa, Z. (2024). Penerapan Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Metode Pareto Abc Dan Optimasi Kualitatif Untuk Efisiensi Pengadaan Obat. In *Jurnal*

- Publikasi Teknik Informatika* (Vol. 3, Issue 2, Pp. 75–87). Politeknik Pratama Purwokerto. <https://doi.org/10.55606/JuPTI.V3i2.3334>
- Ruhimat, A. (2025). Penerapan Theory Of Constraints (Toc) Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi Di Industri Manufaktur. In *Journal Industrial Manufacturing* (Vol. 10, Issue 2, P. 123). Universitas Muhammadiyah Tangerang. <https://doi.org/10.31000/Jim.V10i2.14796>
- Santoso, E. E., & Mariana, M. (2024). Analisis Kemampuan Kerja, Motivasi Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. In *Distribusi - Journal Of Management And Business* (Vol. 12, Issue 1, Pp. 27–40). Universitas Mataram. <https://doi.org/10.29303/Distribusi.V12i1.430>
- Saputra, D., & Nugroho, M. A. S. (2025). Evaluasi Kinerja Guru Di Sdn Giricahyo Ditinjau Dari Standar Standar Kinerja Guru: Studi Kualitatif. In *Economic Reviews Journal* (Vol. 4, Issue 4). Masyarakat Ekonomi Syariah Bogor. <https://doi.org/10.56709/Mrj.V4i4.972>
- Srifridayanti, S., Fathurrahman, F., & Nurvianti, D. (2023). Evaluasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu. In *Jurnal Administrator* (Vol. 5, Issue 1, Pp. 37–46). Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu. <https://doi.org/10.55100/Administrator.V5i1.63>
- Sujana, I. G. (2024). Kedudukan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945. In *IJOLARES : Indonesian Journal Of Law Research* (Vol. 2, Issue 1, Pp. 7–13). CV Tirta Pustaka Press. <https://doi.org/10.60153/Ijolares.V2i1.41>
- Sumandiyar, A., & Nur, H. (2023). RELASI KUASA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)JELANG PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN MAROS. In *Phinisi Integration Review* (Vol. 6, Issue 3, P. 371). Universitas Negeri Makassar. <https://doi.org/10.26858/Pir.V6i3.52227>
- Supryadi, A. D. Y. (2024). Urgensi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Guna Menyelidiki Dugaan Kecurangan Pemilu. In *Ganec Swara* (Vol. 18, Issue 1, P. 491). Yayasan Al-Amin Qalbu. <https://doi.org/10.35327/Gara.V18i1.785>
- Syahidah, A. (2024). Analisis Peran Dan Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (Dpd) Selama Empat Periode. In *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan* (Vol. 6, Issue 1, Pp. 24–30). Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara. <https://doi.org/10.55745/Jwbp.V6i1.168>

- Tampubolon, L. (2024). Analisis Pengaruh Kompetensi, Kemampuan Komunikasi Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan. In *Akuntansi Prima* (Vol. 5, Issue 2, Pp. 124–147). Universitas Prima Indonesia. <https://doi.org/10.34012/japri.v5i2.4321>
- Tresia, T., Yanto, Y., & Risdiyanto, B. (2024). Analisis Konten Edukasi Kesehatan Mental Di Instagram (Analisis Isi Kualitatif Pada Akun Instagram @StudiDjiwa). In *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* (Vol. 3, Issue 3). Unived Press. <https://doi.org/10.37676/mude.v3i3.6450>
- Wulandami, T., Nazaruddin, & Situmorang, S. H. (2023). Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan. In *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan* (Vol. 2, Issue 2, Pp. 35–42). Politeknik Pratama Purwokerto. <https://doi.org/10.55606/jimak.v2i2.1437>
- Yulianita, E. P., Salman, R., & Ramadhan, R. (2024). Konstitusionalitas Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Pada Pengisian Jabatan Publik Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. In *Amnesti: Jurnal Hukum* (Vol. 6, Issue 1, Pp. 99–115). Universitas Muhammadiyah Purworejo. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4080>